

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 KESIMPULAN

Tuntutan kepada Provinsi Sumatera Barat dalam menyelesaikan RPJPD tahun 2024 – 2045 memiliki dinamika yang cukup kompleks. Bappeda dan Gubernur Sumatera Barat memperlihatkan usaha dalam menyelesaikan rancangan Kebijakan Rencana Jangka Panjang Daerah tahun 2024 -2045. Sebagai bagian dari proses penyusunan kebijakan, tuntutan untuk output secara berkelanjutan memiliki dinamika tersendiri dalam proses interaksi antara Pemerintah dan CSO.

Beragam pendekatan dilakukan baik secara teknokratik maupun partisipatif, membuat perumusan menjadi lebih terarah, namun tidaklah merupakan urusan yang mudah dalam pelaksanaannya. Tahapan secara partisipatif yang dilalui ini menekankan proses pencapaian secara substantif, dengan melalui proses konsultasi publik dan musrenbang, sehingga menciptakan multiperspektif antara CSO maupun Pemerintah. CSO sebagai kelompok masyarakat sipil secara mandiri mengelola kelompoknya sendiri, seharusnya memiliki kepentingan yang lebih kompleks dari berbagai sektor. Pada akhirnya proses ini menciptakan gagasan atau ide tersendiri, yang mampu dirumuskan menjadi analisis kajian oleh kelompok kerja (pokja) oleh Bappeda dan instansi terkait.

Eksistensi, keterlibatan dan peran CSO dalam perencanaan pembangunan daerah di Sumatera Barat sangat dirasa belum maksimal. Kesimpulan ini mengutip contoh yang telah disajikan pada tulisan sebelumnya, dimana sekitar 131 kelompok/CSO yang diundang dalam Musrenbang sepertinya belum maksimal dalam melakukan peran. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum mampu

menggali ide dan gagasan dari CSO secara mendalam yang mengakibatkan kurang maksimal peran dari CSO dalam keterlibatan dalam perencanaan pembangunan daerah.

1. Pemerintah Daerah Provinsi tidak memiliki Bank Data ataupun peta CSO yang berada di Sumatera Barat. Dan secara tupoksi pembinaan dan pendataan CSO dan ormas lainnya berada dalam kewenangan Badan Kesbangpol.
2. Pelibatan CSO dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan perumusan perencanaan daerah, baik dalam konsultasi publik maupun musrenbang masih dalam tataran formalitas dan administratif saja, belum menyentuh secara substantif. Pemerintah daerah sudah sangat yakin dengan rumusan perencanaan yang dibuat oleh Tim Perumus yang kebanyakan dari mereka adalah kalangan akademisi.
3. CSO tidak memiliki pemahaman yang baik terhadap RPJPD, dikarenakan pemerintah daerah tidak memberikan draft RPJPD tersebut kepada CSO jauh sebelum forum pembahasan dilaksanakan. Harapannya adalah CSO bisa menganalisa, melakukan kajian dan memberikan rekomendasi terhadap RPJPD dimaksud.
4. Kegiatan dan forum yang dibuat oleh pemerintah dalam membahas RPJPD seperti Konsultasi Publik dan Musrenbang, selain bersifat normatif dan administratif, *run down*/urutan acaranya pun bersifat seremoni. Dimana hampir dari separo waktu pelaksanaan diisi dengan kata-kata sambutan dari berbagai pihak dan instansi.
5. Pemerintah daerah pada pembahasan RPJPD saat ini telah melakukan terobosan yang luar biasa dengan melibatkan banyak *stake holder* dalam

pembahasan RPJPD 2025-2045 ini. Berbeda jauh dari pelaksanaan forum-forum perencanaan sebelumnya, dimana keterlibatan pemangku kepentingan sangat terbatas, pelibatan lebih cenderung kepada organisasi-organisasi yang melekat dengan pemerintah atau organisasi plat merah.

6.2 SARAN

Melalui saran penelitian ini, peneliti berharap bahwa Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat meningkatkan kolaborasi dengan CSO untuk menjamin perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Artinya dokumen perencanaan daerah ini memenuhi unsur konsistensi, komprehensif, terukur dan dapat ditindaklanjuti dalam implementasi pembangunan. Tujuannya untuk mengembangkan kondisi yang memperhitungkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah, yang dihasilkan dari pencapaian hasil program organisasi daerah. Indikator target juga ditetapkan untuk tujuan tersebut, dan rencana disusun untuk mencapai tujuan tahun tersebut. Tujuan tersebut perlu dicapai secara terus menerus dalam jangka waktu/tahun tertentu, dengan tidak lupa membangun sinergi dengan CSO di Sumbar, sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada suatu sektor atau instansi pemerintah seharusnya dapat menampung kepentingan masyarakat dari berbagai lapisan. Seperti halnya disabilitas tidak hanya membutuhkan sinergitas dengan dinas sosial, namun juga pada ranah penyusunan kebijakan publik, instansi pemerintah daerah lain juga memiliki agenda terkait dengan isu/masalah tersebut. Tentunya ini menjadi tantangan daerah kedepannya, agar Rencana Pembangunan Jangka Panjang menjadi lebih berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah Provinsi sebaiknya memiliki langkah-

langkah strategis dalam memaksimalkan peran CSO dalam perencanaan pembangunan daerah peta, diantaranya :

1. Pemerintah Daerah agar memiliki data dan informasi CSO yang ada di Sumatera Barat. Peta dimaksud juga memuat data base CSO beserta fokus kerjanya, kemudian CSO ini berada dibawah koordinasi OPD yang selaras dengan tujuan pergerakan CSO tersebut, sehingga pada saat yang dibutuhkan pemerintah daerah dapat langsung melakukan koordinasi dan komunikasi.
2. Pemerintah daerah agar melakukan pembinaan berkelanjutan terhadap CSO, baik pembinaan administrasi, wawasan kebangsaan, partisipasi dan bidang lainnya. Sehingga CSO memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Peningkatan kapasitas (*capacity building*) CSO menjadi sektor terpenting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah. Agar eksistensi CSO di Sumatera Barat lebih dirasakan, karena peran mereka dalam perencanaan pembangunan, implementasi pembangunan dan monitoring/evaluasi pembangunan. Pemerintah di tuntut untuk lebih giat melakukan pembinaan kepada CSO, terutama keterlibatan dalam perencanaan pembangunan daerah dan dalam program pemerintah daerah lainnya.
4. Pemerintah daerah harus membangun kolaborasi dan senergitas dengan CSO, penting bagi pemerintah untuk duduk semeja dengan CSO, komunikasi yang rutin, pelibatan dalam program dan *coffe morning*. Kemudian dalam pelaksanaan program sangat penting CSO ini dilibat sedara awal, selain sangat membantu dalam pembangunan juga akan mengurangi adanya pihak oposisi dalam perjalanan pemerintah daerah.

5. Pada kondisi keuangan daerah stabil dan memadai, pemerintah daerah dapat memberikan pendanaan kepada CSO melalui dana hibah organisasi. Sehingga potensi CSO ini dapat dimaksimalkan dalam pembangunan daerah.

